

Jubir PM Jepang Mengundurkan Diri Gara-gara Makan Malam Mahal

TOKYO(AM)- Makiko Yamada, juru bicara (jubir) utama Perdana Menteri (PM) Jepang Yoshihide Suga, mengundurkan diri setelah dia dan birokrat senior lainnya ditegur karena menghadiri makan malam mahal yang diselenggarakan oleh putra Suga.

Juru bicara pemerintah yang juga Kepala Sekretaris Kabinet Katsunobu Kato mengatakan kepada wartawan bahwa Yamada akan mengajukan pengunduran dirinya pada Senin (1/3).

Pemerintahan Suga, termasuk Sekretaris Hubungan Masyarakat Kabinet Yamada, 60, telah menghadapi kemarahan publik setelah majalah mingguan Shukan Bunshun bulan lalu melaporkan bahwa putra tertua Suga, Seigo Suga, seorang eksekutif di sebuah perusahaan film, telah membayar makan malam mahal untuk birokrat senior.

Pemerintahan Suga, termasuk Sekretaris Hubungan

Masyarakat Kabinet Yamada, 60, telah menghadapi kemarahan publik setelah majalah mingguan Shukan Bunshun bulan lalu melaporkan bahwa putra tertua Suga, Seigo Suga, seorang eksekutif di sebuah perusahaan film, telah membayar makan malam mahal untuk birokrat senior.

Undang-Undang Etika Pegawai Negeri Sipil Jepang melarang pegawai pemerintah menerima hadiah atau hiburan dari perusahaan atau individu yang terkecas menajilat. Beberapa laporan media lokal yang dikutip Reuters juga mengatakan bahwa Yamada telah dirawat di rumah sakit. Artinya, dia akan melewatkan pertemuan komite parlemen hari Senin di mana politisi oposisi akan menanyainya tentang makan malam dengan Seigo Suga pada tahun 2019, ketika dia menjadi pejabat di Kementerian Urusan Dalam Negeri dan Komunikasi. ● **gul**

Filipina Tolak Jadi Tempat Persenjataan Nuklir AS

MANILA(AM) - Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengatakan dia menolak jika Amerika Serikat (AS) menyalahkan senjata nuklirnya di negaranya. Dia menyebut Filipina siap mengakhiri kesepakatan militer bilateral dengan AS jika hal itu terjadi.

"Saya telah membuat pernyataan bahwa kami akan mengadopsi kebijakan luar negeri yang independen. Saya meyakinkan China bahwa saya tidak akan mengizinkan persenjataan nuklir Amerika disimpan di Filipina," kata Duterte pada konferensi pers di Pangkalan Udara Villamor di Kota Pasay Senin (1/3), dikutip laman Anadolu Agency.

Sikap demikian, kata Duterte, bukan karena negaranya berpihak pada China. Namun konstitusi Filipina melarang kehadiran senjata nuklir. "Kami tidak menginginkannya. Tapi saya memperingatkan Anda, jika saya mendapatkan informasi bahwa persenjataan nuklir di sini dibawa

oleh Anda (AS), saya akan segera meminta Anda keluar dan saya akan mengakhiri Visiting Forces Agreement (VFA)," ujarnya.

VFA diratifikasi pada 1999. Perjanjian itu membebaskan personel militer AS dari peraturan paspor dan visa ketika mereka datang untuk latihan bersama serta melatih pasukan di Filipina. Duterte mengungkapkan dia berencana mengunjungi Tiongkok akhir tahun ini.

Dia hendak mengucapkan terima kasih secara langsung kepada Presiden Xi Jinping. Hal itu terkait sumbangan vaksin Sinovac yang diberikan China kepada Filipina. "China telah memberi kami segalanya, tetapi tidak pernah meminta apa pun kepada kami," katanya.

Filipina telah menerima 600 ribu dosis vaksin Sinovac dari China. Sejauh ini, Filipina sudah menginginkannya. Tapi saya memperingatkan Anda, jika saya mendapatkan informasi bahwa persenjataan nuklir di sini dibawa



UNJUK RASA MENENTANG KUDETA MILITER MYANMAR

Pengunjuk rasa memakai topeng mirip pemimpin yang digulingkan Aung San Suu Kyi, memperlihatkan salam tiga jari saat mereka berpartisipasi dalam sebuah protes terhadap kup militer di Yangon, Myanmar, Minggu (28/2).

PBB Sebut 18 Demonstran di Myanmar Tewas Akibat Kekerasan Polisi

PBB mengutuk kekerasan yang meningkat terhadap protes di Myanmar dan menyerukan kepada militer untuk segera menghentikan penggunaan kekuatan terhadap pengunjuk rasa damai.

YANGON(AM) - Polisi Myanmar terus melanjutkan aksi keras mereka terhadap demonstran anti-kudeta. Kantor HAM PBB di Myanmar menuturkannya, setidaknya 18 demonstran tewas akibat tindakan keras polisi.

Polisi melepaskan tembakan di berbagai bagian kota terbesar Yangon, setelah granat kejut, gas air mata, dan tembakan ke udara gagal memecah kerumunan. Polisi sema-

kin kuat setelah mendapatkan bantuan dari tentara.

Beberapa orang yang terluka diangkat oleh sesama demonstran, meninggalkan noda darah di trotoar. Seorang dokter yang meminta untuk tidak disebutkan namanya menuturkannya, seorang pria meninggal setelah dibawa ke rumah sakit dengan peluru di dadanya.

"Polisi dan pasukan militer telah menghadapi demonstrasi damai, menggunakan kekuatan

yang mematikan dan tidak terlalu mematikan. Menurut informasi yang dapat dipercaya yang diterima oleh Kantor HAM PBB, telah menyebabkan sedikitnya 18 orang tewas dan lebih dari 30 luka-luka," kata Kantor HAM PBB, seperti dilansir Reuters pada Senin (1/3).

"Kami mengutuk keras kekerasan yang meningkat terhadap protes di Myanmar dan menyerukan kepada militer untuk segera menghentikan penggunaan kekuatan terhadap pengunjuk rasa damai," kata Kantor HAM PBB.

Myanmar berada dalam kecaauan sejak tentara merebut kekuasaan dan menahan pemimpin pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi dan sebagian besar jajaran partainya. Militer menuduh kubu Suu Kyi melakukan kecurangan dalam

pemilu November lalu.

Kudeta, yang menghentikan langkah tentatif menuju demokrasi setelah hampir 50 tahun pemerintahan militer, telah menarik ratusan ribu orang turun ke jalan dan menuai kekacauan dari negara-negara Barat.

Sementara itu, terkait terbunuh 18 demonstran, media pemerintah menyalahkan kubu demonstran dengan menyebutnya terlalu anarkis.

"Tindakan berat pasti akan diambil terhadap pengunjuk rasa yang rusuh," tulis Global New Light Of Myanmar, media yang dikelola negara yang saat ini dikendalikan junta.

"Tentara sebelumnya telah menunjukkan pengendalian, tetapi tidak bisa mengabaikan massa anarkis," lanjut laporan media tersebut, seperti dikutip Reuters, Senin (1/3).

Sementara itu, Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri, mengaku sangat prihatin dengan perkembangan situasi di Myanmar. Sejumlah demonstran dilaporkan tewas setelah polisi Myanmar melepaskan tembakan ke arah mereka.

"Indonesia sangat prihatin dengan meningkatnya kekerasan di Myanmar yang telah menyebabkan korban jiwa dan luka-luka," kata Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam sebuah pernyataan.

Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Indonesia menyerukan agar aparat keamanan tidak menggunakan kekerasan dan menahan diri guna menghindari lebih banyak korban jatuh serta mencegah situasi tidak semakin memburuk. ● **tom**

Trump Isyaratkan Akan Calonkan Diri Kembali pada 2024

WASHINGTON(AM) - Kurang dari enam minggu setelah meninggalkan jabatan, mantan presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melancarkan serangkaian serangan terhadap penerusnya Presiden Joe Biden pada Minggu (28/2). Trump mengatakan Biden menjalankannya "sebulan pertama yang paling buruk dalam sejarah modern" di

Gedung Putih.

"Dalam satu bulan saja, kita berubah dari Amerika yang pertama menjadi Amerika yang terakhir," kata Trump. Pernyataannya disambut meriah oleh ratusan pendukung konservatif yang memadati sebuah balai riung (ballroom) hotel di Orlando, negara bagian Florida.

Trump pun mengisyaratkan dengan kuat bahwa dia mungkin akan berusaha men-

calonkan diri lagi dalam pemilihan presiden 2024.

"Saya mungkin memutuskan untuk mencalonkan diri lagi," kata Trump dalam Konferensi Aksi Politik Konservatif (CPAC). Dia berjanji akan berkampanye untuk "para pemimpin Partai Republik yang kuat dan tangguh" untuk berusaha merebut kontrol DPR dan Senat dalam pemilu Kongres 2022.

"Kira-kira siapa ya?" kata

Trump mengenai calon presiden Partai Republik 2024 mendatang.

"Siapa, siapa kira-kira orang itu?" lanjutnya.

Penampilan Trump itu merupakan yang pertama di hadapan publik sejak meninggalkan jabatan.

Dalam pidato selama 90 menit, Trump mengisyaratkan dengan kuat akan mencalonkan diri sebagai presiden. Dia mengutip sebuah jajak pendapat

yang dilakukan dalam konferensi yang sangat partisan itu yang memperlihatkan dia mendapat tingkat persetujuan 97% selama empat tahun menjabat di Gedung Putih. Padahal berbagai jajak pendapat nasional memperlihatkan Biden dengan tingkat persetujuan lebih besar dan popularitas Trump pudar sejak masa jabatannya berakhir. ● **ans**

AS Tak Hukum Putra Mahkota Arab Saudi soal Khashoggi, Ini Alasannya

WASHINGTON(AM)- Pemerintah Amerika Serikat (AS) tidak menjatuhkan sanksi atau menghukum Putra Mahkota Arab Saudi Mohammad bin Salman (MBS) dalam kasus pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi. Padahal, laporan intelijen Amerika menyalahkan calon raja Saudi tersebut.

Gedung Putih membela keputusannya untuk tidak secara langsung memberi sanksi kepada MBS ketika kritik bermunculan sebelum Washington akan mengumumkan kebijakan baru terhadap Riyadh pada hari Senin (1/3).

Psaki mengatakan keputusan pemerintah Biden ini sebagai bagian dari diplomasi.

"Kami yakin ada [ada] cara yang lebih efektif untuk memastikan hal ini tidak terjadi lagi dan juga dapat memberikan ruang untuk bekerja dengan Saudi di area di mana ada kesepakatan bersama—di mana terdapat kepentingan nasional untuk Amerika Serikat. Seperti itulah bentuk diplomasi," kata Psaki kepada CNN.

Joe Biden tidak menjelaskan apa yang akan diumumkan pada hari Senin, dan hanya mengatakan bahwa pendekatan umum ke Arab Saudi itu akan menjadi "signifikan" dan menjelaskan bahwa "peraturan sedang berubah".

"Kami akan meminta pertanggungjawaban mereka atas pelanggaran HAM," kata

Biden kepada Univision. Dia mengaku telah memperingatkan Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud tentang pengumuman itu dalam percakapan telepon pada hari Jumat.

Gedung Putih mengatakan bahwa pihaknya memandang raja berusia 85 tahun itu sebagai rekan Biden daripada putra mahkota berusia 35 tahun, yang memiliki kendali atas kebijakan sehari-hari.

CNN mengutip dua pejabat pemerintah yang tidak disebutkan namanya yang mengatakan bahwa memberi sanksi kepada pangeran MBS bukanlah pilihan karena akan membahayakan kehadiran AS di Arab Saudi, di mana Amerika memiliki lima pangkalan. Akibatnya, Departemen Luar Negeri bahkan tidak diminta memberikan opsi untuk memberikan sanksi kepada Pangeran Mohammad bin Salman.

Dengan publikasi laporan intelijen AS tentang pembunuhan Khashoggi tahun 2018, pemerintahan Biden mengatakan pihaknya memberlakukan pembatasan visa pada 76 orang Saudi yang terlibat dalam pembunuhan. Sanksi terhadap 76 warga Saudi itu dikenal sebagai "Khashoggi Ban".

Tidak dijelaskan secara eksplisit bahwa Pangeran MBS tidak ada dalam daftar 76 warga Saudi yang terkena sanksi, tetapi pernyataan Psaki pada hari Minggu terlihat mengesampingkan hal itu. ● **tom**

Dugaan Pelecehan Seksual, Gubernur New York Minta Maaf, Bantah Tuduhan

NEW YORK(AM) - Gubernur New York Andrew Cuomo meminta maaf apabila perilakunya "dianggap sebagai pelecehan yang tak diinginkan" pada Minggu (28/2). Pernyataan itu disampaikan di tengah beberapa dugaan pelecehan seksual yang dihadapinya.

"Terkadang saya pikir saya hanya iseng dan melontarkan guyonan yang saya pikir lucu... Saya tidak bermaksud menyinggung dan hanya berusaha meringankan suasana kerja yang serius," terang Cuomo melalui pernyataan yang dirilisnya.

Sekarang saya mengerti bahwa interaksi saya mungkin kurang sensitif atau terlalu personal," lanjutnya.

Dia mengakui beberapa komentarnya mungkin "dianggap sebagai pelecehan atau godaan yang tak diinginkan." "Apabila ada yang merasa demikian, saya sangat minta maaf," ujarnya. Namun, dia membantah pernah menyentus secara tidak pantas atau mengajak siapapun melakukan hubungan seksual.

Cuomo juga menyerukan dilakukannya pemeriksaan

independen atas tuduhan-tuduhan itu.

Seperti diketahui Cuomo dikritik tajam, termasuk oleh sesama anggota Partai Demokrat. Hal ini terjadi setelah mantan pegawai bernama Charlotte Bennett mengatakan kepada harian New York Times bahwa Cuomo melecehkannya tahun lalu.

Tuduhan itu disampaikan hanya empat hari setelah seorang mantan pegawai bernama Lindsey Boylan mengaku pernah mendapat kontak fisik yang tak diinginkan dari Cuomo. ● **tom**



UNJUK RASA ANTI PEMERINTAH DI BANGKOK

Pengunjuk rasa membawa bendera saat protes anti-pemerintah di Bangkok, Thailand, Minggu (28/2).



PANDEMI VIRUS KORONA DI YERUSALEM

Seorang pria Ultra Orthodox memakai tiga masker pelindung di wajahnya sambil merayakan Purim di tengah pembatasan penyakit virus korona (COVID-19) di Yerusalem, Minggu (28/2).

Pompeo Klaim Banyak Orang Arab Saudi Ingin Berdamai dengan Israel

WASHINGTON(AM) - Mantan menteri luar negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo mengatakan banyak orang di Arab Saudi ingin berdamai atau memiliki hubungan normal dengan Israel. Dia menyuarakan harapan kerajaan kaya minyak itu akan bergabung dengan Perjanjian Abraham yang disepakati selama pemerintahan Donald Trump.

Pompeo, yang pernah menjabat sebagai direktur CIA dan diplomat top era Trump, membuat komentar itu dalam rekaman video pidato untuk Combat Anti-Semitism Movement, yang akan memberinya Global Leadership Award perdana pada hari Senin (1/3).

Di bawah Perjanjian Abraham yang ditandatangani oleh Trump tahun lalu, empat negara mayoritas Arab—Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, dan Sudan—setuju untuk menjalin hubungan dengan Israel.

Media Israel dipenuhi dengan spekulasi tentang negara-negara Arab lain yang tertarik untuk bergabung dengan pakta tersebut, yang mana pembangkit tenaga listrik Arab Saudi secara luas dianggap sebagai hadiah utama untuk negara Yahudi tersebut.

"Memprediksi masa depan telah membuktikan perjuangan bagi saya," kata Pompeo dalam sambutannya yang dibagikan kepada AFP. Dia menambahkan bahwa dia berpikir lebih banyak lagi negara yang akan mencari hubungan dengan Israel.

"Saya berharap Kerajaan Arab Saudi dapat menemukan jalannya untuk bergabung dengan Perjanjian Abraham. Saya tahu banyak orang di negara itu menginginkan hal itu terjadi," katanya.

Sumber di Yerusalem mengatakan Pompeo dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bertemu dengan Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman pada November di kota Laut Merah, Neom. Pertemuan itu, yang dibantah oleh Riyadh, memicu spekulasi hingar-bingar di Israel bahwa

kesepakatan normalisasi mungkin sudah dekat.

Secara publik, Kerajaan Arab Saudi telah menegaskan kebijakannya yang telah berusia puluhan tahun untuk tidak menjalin hubungan dengan Israel sampai kesepakatan tercapai untuk menyelesaikan konflik Palestina.

Pemerintahan Trump mendekati Riyadh ketika berusaha mengisolasi musuh bersama mereka; Iran, dan menahan kritik keras atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di kerajaan, termasuk atas pembunuhan jurnalis dan kritikus kerajaan; Jamal Khashoggi, yang meninggal pada 2018.

Melanggar pendekatan Trump, Presiden AS Joe Biden mengatakan pada hari Jumat bahwa Washington akan meminta pertanggungjawaban Arab Saudi atas pelanggaran HAM dengan merilis laporan intelijen yang menuduh Putra Mahkota Mohammad bin Salman menyetujui pembunuhan Khashoggi oleh agen-agen nakh Saudi di Istanbul, Turki.

Pompeo lebih lanjut mengklaim Perjanjian Abraham dimungkinkan oleh pembunuhan AS terhadap jenderal Iran Qassem Soleimani, dalam serangan udara, dengan alasan itu membangun kepercayaan antara Washington dan sekutu Arab-nya.

"Ketika para pemimpin di dunia Arab melihat bahwa Amerika Serikat siap untuk melakukan ini, untuk melawan Iran, untuk melawan kepemimpinan IRGC [Korps Garda Revolusi Islam] khususnya Qassem Soleimani, mereka tahu bahwa mereka memiliki seorang teman," kata Pompeo.

"Mereka tahu bahwa mereka dapat membangun serangkaian kesepakatan dengan negara Israel, ini bukanlah masalah yang terputus, mereka sangat terkait, satu tidak dapat terjadi tanpa yang lain," tambahnya.

Pelapor khusus PBB tentang pembunuhan di luar hukum, Agnes Callamard, mengatakan pembunuhan Soleimani "melanggar hukum". ● **gul**